

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Konsep yang Mendasari Penelitian

2.1.1 Kajian tentang Pembinaan

2.1.1.1 Pengertian Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan adalah suatu proses atau cara, pembaharuan, usaha atau tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik. Sedangkan menurut

A.M Mangundhardjana dalam Fajardani (2019:27) mendefinisikan Pembinaan yaitu:

Pembinaan adalah sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hal hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang untuk menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efektif.

Pembinaan merupakan proses pengembangan diri yang bersifat komprehensif. Proses ini tidak hanya berfokus pada aspek penambahan pengetahuan baru, tetapi juga dalam hal evaluasi sehingga terjadi proses peningkatan terhadap apa yang sudah dimiliki. Tujuannya adalah untuk memberdayakan individu agar dapat meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan.

2.1.2.2 Tujuan Pembinaan

Pembinaan adalah sebuah proses sehingga memiliki tujuan. Amin (2010:46) menyebutkan tujuan dari pembinaan dan pembimbingan adalah:

1. Pembinaan bertujuan untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental.

2. Pembinaan bertujuan untuk menghasilkan perubahan, perbaikan, dan kesempurnaan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, keluarga, lingkungan sosial.
3. Pembinaan bertujuan untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan mampu berkembangnya rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong dan rasa kasih sayang.
4. Pembinaan bertujuan untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada tuhan.
5. Pembinaan bertujuan untuk menghasilkan potensi ilahiah sehingga individu dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar.

Tujuan pembinaan secara keseluruhan untuk menciptakan individu yang berkualitas, baik dari segi kesehatan jiwa, mental, tingkah laku, kecerdasan emosional dan spiritual, serta memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya. Maka dari itu, dengan adanya tujuan-tujuan pembinaan tersebut, individu diharapkan dapat hidup bahagia, sukses, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Berdasarkan pengertian dan tujuan pembinaan yang dikemukakan secara umum, Pembinaan dilaksanakan melalui program pembinaan dalam penelitian ini mengkhususkan Program Pembinaan yang dilaksanakan di LAPAS.

2.1.2 Kajian tentang Program Pembinaan di Lapas

2.1.2.1 Pengertian Program Pembinaan di Lapas

Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan selaras dengan adanya aliran hukum pidana yaitu aliran modern yang mengatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk pembinaan dan pencegahan kejahatan atau tindak pidana. Selain itu Program Pembinaan juga dilatarbelakangi dengan berlakunya sistem pemasyarakatan Indonesia yang menitikberatkan pada aspek Pembinaan bagi WBP.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan WBP menjelaskan bahwa Pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, professional, kesehatan jasmani, dan rohani WBP dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pembinaan yang dilaksanakan di LAPAS merupakan serangkaian kegiatan yang diberikan oleh WBP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri mencakup peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengembangan intelektual, pembentukan sikap dan perilaku, serta peningkatan kesehatan jasmani dan Rohani dalam rangka mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

2.1.2.2 Jenis Program Pembinaan di Lapas

Lapas melaksanakan dua program pembinaan yaitu Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian. Berikut penjelasan kedua program tersebut:

1. Program Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP merupakan kegiatan yang berkaitan dengan hal hal ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum dan reintegrasi dengan masyarakat yang diharapkan dapat membentuk mental dan watak WBP menjadi manusia seutuhnya, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, keluarga dan Masyarakat.

Lapas Kelas IIA Garut melaksanakan Program Pembinaan Kepribadian

melalui berbagai jenis kegiatan diantaranya kegiatan kerohanian baik agama islam maupun kristen yang bekerja sama dengan Kementerian Agama dan MUI untuk mengadakan pembinaan kerohanian, kegiatan pramuka, kegiatan kesadaran hukum, dan kegiatan olahraga serta seni.

2. Program Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan WBP merupakan kegiatan yang berkaitan dengan hal hal keterampilan kerja dan latihan kerja serta produksi. Tujuan dari pembinaan kemandirian ini untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan WBP sesuai minat dan bakat yang nantinya dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup setelah bebas dari masa hukuman pidana.

Lapas Kelas IIA Garut melaksanakan Program Pembinaan Kemandirian melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan rajut, ternak domba, ternak ayam pedaging, ternak ayam petelur, ternak lele, pangkas rambut, menjahit, pembuatan minuman kopi, dan UMKM.

Program Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian tersebut wajib diikuti oleh seluruh WBP yang sedang menjalani masa hukuman di LAPAS sejak awal masuk hingga batas waktu yang ditentukan.

2.1.3 Kajian tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

2.1.3.1 Definisi Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan narapidana, anak binaan, dan

klien. Selanjutnya definisi narapidana tercantum dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

Narapidana yaitu orang yang telah dijatuhi pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup, atau hukuman mati yang sedang menunggu eksekusi putusan, dan saat ini sedang menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

WBP dalam hal ini merupakan seseorang yang telah melanggar hukum dan kehilangan hak kebebasannya dan memiliki tuntutan-tuntutan baik dari dalam dan luar dirinya. WBP yang menjalani masa hukuman di Lapas akan menjalani proses Pembinaan.

2.1.3.2 Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan

WBP selama menjalani masa hukuman di Lapas masih mempunyai hak sebagaimana layaknya manusia biasa. Hal ini sebagai wujud nyata menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hak sejatinya tidak berdiri sendiri melainkan akan didampingi oleh kewajiban sehingga WBP selain mendapatkan haknya, mereka juga wajib menjalankan kewajibannya. Hak dan kewajiban WBP diatur dalam pasal 9 dan 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berikut uraian pasal 9 terkait hak dan pasal 11 terkait kewajiban WBP.

1. Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, WBP mempunyai hak yaitu:

- 1) Beribadah sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Mendapatkan perawatan fisik dan mental yang memadai.
- 3) Memperoleh pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasi, dan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan potensi.
- 4) Memperoleh layanan kesehatan dan supan gizi yang sesuai dengan

kebutuhan.

- 5) Memperoleh informasi yang dibutuhkan.
- 6) Mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum sesuai kebutuhan.
- 7) Mengajukan pengaduan atau keluhan secara terbuka.
- 8) Memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Diperlakukan dengan hormat dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, atau eksploitasi yang bisa dapat merugikan baik secara fisik dan mental.
- 10) Memperoleh layanan sosial yang dibutuhkan.
- 11) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, atau masyarakat sesuai keinginan pribadi.

Selain hak-hak yang disebutkan, WBP yang memenuhi syarat tertentu berhak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti untuk mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, serta hak lainnya sesuai peraturan perundang undangan. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi adalah WBP harus menunjukkan perilaku yang baik, aktif mengikuti program pembinaan dan mengurangi risiko perilaku yang tidak diinginkan.

WBP memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh siapapun. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebebasan beribadah hingga layanan sosial. Memahami dan menghormati hak-hak WBP sama halnya kita berkontribusi pada sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi.

2. Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, WBP mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku.
- 2) Mengikuti secara aktif program pembinaan.

- 3) Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari;
- 4) Menghormati hak asasi setiap individu di lingkungan tempatnya berada; dan
- 5) Narapidana juga diharapkan untuk bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang mengatur tentang kewajiban WBP telah menegaskan bahwa setiap WBP harus menaati dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Lapas, selain itu WBP juga harus menghormati hak-hak orang lain yang ada di sekitar mereka.

2.1.4.3 Permasalahan Warga Binaan Pemasyarakatan

WBP atau seorang individu yang sedang menjalani masa hukuman, bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar norma norma masyarakat menghadapi berbagai permasalahan selama menjalani kehidupan di Lapas. Berbagai permasalahan tersebut adalah kecemasan, depresi, masalah kesehatan, kekerasan antar WBP, kondisi lapas yang sudah melewati batas daya tampung WBP, Program Pembinaan yang diberikan kurang maksimal, akses pendidikan dan pekerjaan yang terbatas dan isolasi sosial dari keluarga dan Masyarakat.

Kondisi Lapas yang kurang baik seperti terjadi kelebihan daya tampung dan kualitas serta kuantitas fasilitas yang kurang memadai dapat menyebabkan kondisi kesehatan baik jasmani dan rohani WBP tidak stabil. Kekerasan yang terjadi antar WBP dapat menjadi sebuah ancaman keamanan siapapun termasuk bagi WBP lain yang tidak ikut terlibat. Selain itu Program Pembinaan yang diberikan kurang maksimal dapat menyebabkan proses persiapan WBP untuk

kembali ke masyarakat juga kurang maksimal sehingga memungkinkan terjadi pengulangan tindakan kriminal.

WBP yang menjalani masa hukuman di Lapas seringkali juga dihadapkan pada masalah kondisi psikologis seperti cemas hingga mengalami depresi karena akan menjalani kehidupan yang baru dan serba terbatas di dalam lapas, kurang interaksi bersama keluarga dan masyarakat luas, serta khawatir bagaimana nasibnya setelah masa hukumannya selesai. Menurut Harsono dalam Gusmaya (2023) pidana secara psikologis merupakan beban terberat bagi setiap WBP sehingga menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah hilangnya kepribadian, hilangnya rasa aman, hilang kemerdekaan, keterbatasan berkomunikasi dengan siapapun, kehilangan akan pelayanan, hilangnya naluri seks, kasih sayang, rasa aman Bersama keluarga dan lawan jenis, kehilangan harga diri, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kesempatan untuk menyalurkan kreatifitas, meraih impian, serta cita-cita.

Permasalahan yang dialami oleh WBP ketika menjalani masa hukumannya di Lapas secara keseluruhan tergolong kompleks, sehingga banyak upaya upaya yang semestinya dilakukan untuk mengurangi sedikit permasalahan yang ada seperti memberikan dukungan psikososial yang memadai, membuka akses pendidikan dan kesempatan kerja, dan pelaksanaan program pembinaan yang maksimal.

Permasalahan yang dihadapi oleh WBP Kasus Pencurian terkait pembinaan tidak jauh berbeda dengan permasalahan WBP secara umum, namun jika dikaitkan dengan faktor penyebab terjadinya pencurian permasalahan yang

dihadapi oleh WBP Kasus Pencurian diantaranya mengubah kebiasaan dari mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan instant menjadi harus bekerja, perubahan lingkungan termasuk kebebasan dalam beraktifitas dan cemas memikirkan keluarga.

2.1.4 Kajian tentang Pencurian

2.1.4.1 Pengertian Pencurian

Hasibuan dalam Saumia (2023:16) menjelaskan tentang pencurian yaitu:

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.

Batasan yang jelas terkait pencurian diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”

Kesimpulan dari pengertian pencurian berdasarkan kedua hal tersebut, Pencurian adalah salah satu tindak pidana atau kejahatan mengambil benda atau kekayaan seseorang secara paksa untuk dimiliki seutuhnya secara pribadi maupun kelompok.

2.1.4.2 Faktor-Faktor Penyebab Pencurian

Putra dan Nurhafifah (2018) menyebutkan bahwa terdapat enam faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kriminal pencurian adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu faktor yang besar seseorang melakukan kejahatan pencurian. Kondisi ekonomi yang kurang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain sehingga memicu orang tersebut melakukan pencurian demi keberlangsungan hidup tanpa memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

2. Faktor Pendidikan

Proses Pendidikan berperan penting dalam pembentukan pola pikir dan karakter seseorang. bagi mereka yang tidak berpendidikan atau memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki pola pikir yang rendah juga begitupun sebaliknya. tidak mampu berfikir secara logis, inovatif, dan kreatif. Sehingga hal tersebut menyebabkan pola pikir yang dibentuk lebih cenderung mengarah kepada hal hal yang bersifat sederhana tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

3. Faktor Pengangguran

Zaman sekarang pekerjaan semakin sulit untuk didapatkan, hal tersebut juga terjadi karena rata rata tempat melamar pekerjaan memberikan batasan terkait kualifikasi pendidikan minimal lulusan SMA sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan. sehingga orang orang yang memiliki Pendidikan yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dapat melamar pekerjaan sehingga banyak dari orang orang dengan kalangan usia produktif menjadi seorang pengangguran tidak punya pemasukan yang pasti untuk kebutuhan sehari hari akibatnya mereka tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan pencurian agar tetap dapat

bertahan hidup.

4. Faktor Kelalaian Korban

Kelalaian korban dari berbagai bentuk seperti meninggalkan barang berharga di tempat keramaian dan mudah untuk dijangkau, kurang memperhatikan barang-barang pribadi, dan kurang waspada terhadap keadaan lingkungan sekitar, pada dasarnya menjadi salah satu faktor yang signifikan terjadinya kasus pencurian. Ketika pelaku pencurian melihat ada suatu peluang yang besar akibat dari suatu kelalaian tersebut, maka pelaku merasa bahwa aksinya akan berhasil karena didukung oleh situasi yang memungkinkan.

5. Faktor Pergaulan

Pergaulan sejak usia dini hingga dewasa menjadi suatu hal yang penting bagi pembentukan kepribadian. Setiap interaksi, pertemanan, dan hubungan sosial yang dijalani akan meninggalkan bekas. Individu yang tumbuh dalam sebuah lingkungan pergaulan yang positif akan menjunjung tinggi nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Sebaliknya, mereka yang terjerumus dan tumbuh dalam pergaulan yang negatif, seperti terlibat dalam tindakan kriminal dan penyalahgunaan narkoba akan berisiko tinggi memiliki kepribadian yang bermasalah dan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.

6. Faktor *Lifestyle*

Lifestyle atau gaya hidup menjadi fenomena tersendiri di dalam kehidupan manusia. Individu yang terbawa arus gaya hidup melalui media sosial atau lingkungan sekitar dapat merasa tekanan untuk mengikuti tren tersebut sehingga

Individu yang tidak mampu secara finansial tetapi ingin tetap terlihat kaya mungkin memilih jalan pintas seperti mencuri untuk mendapatkan barang mewah.

Enam faktor penyebab pencurian yang diuraikan tersebut dapat dijadikan sebagai indikator atau aspek yang harus diperhatikan dalam memberikan kegiatan Pembinaan bagi para WBP Kasus Pencurian di LAPAS agar hasil yang didapatkan juga dapat berperan dalam mengurangi risiko pengulangan tindak kriminal (residivisme).

2.1.5 Kajian tentang Lembaga Pemasyarakatan

2.1.5.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Lapas merupakan suatu lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.

Pratiwi (2024) mengemukakan bahwa selain sebagai tempat pembinaan, Lapas juga merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana terpadu penegakan hukum yang memiliki peran penting dalam menegakkan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Lapas merupakan suatu lembaga yang melaksanakan pembinaan kepada WBP selain itu Lapas memegang peran penting pada sistem peradilan pidana dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban di Masyarakat.

2.6.1.2 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Lapas sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan sistem pemasyarakatan sehingga tujuan dari Lapas terintegrasi dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; serta
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Tujuan utama dari sistem pemasyarakatan mencakup tiga aspek penting yaitu aspek pertama, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tahanan dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat dipastikan mereka akan diperlakukan secara manusiawi dan secara adil berdasarkan hukum yang berlaku; aspek kedua, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian WBP melalui program pembinaan yang efektif sehingga hasil yang diberikan dapat membantu mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mengembangkan keterampilan agar dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat.; dan aspek ketiga, dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana dengan mengurangi risiko residivisme dan memastikan keamanan seluruh masyarakat melalui Program Reintegrasi Sosial yang sukses.

Ketiga tujuan sistem pemasyarakatan memiliki keterkaitan dalam Praktik Pekerjaan Sosial khususnya dalam *Setting* Koreksional. Pekerjaan Sosial menitikberatkan pada aspek keberfungsian sosial yang mencakup bagaimana individu, keluarga, komunitas/masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, menjalankan tugas dan peran sosialnya dengan baik serta mengatasi masalah

dalam kehidupannya.

2.1.6 Kajian tentang Pekerjaan Sosial

2.1.6.1 Pekerjaan Sosial

1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan Sosial menurut Charles Zastrow dalam Sukoco (2021:14) merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Pekerjaan Sosial sebuah profesi yang dijalankan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan etik yang berupaya memfasilitasi individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat berfungsi sosial secara optimal. Hal ini dilakukan dengan memulihkan dan meningkatkan kemampuan mereka, serta membangun kondisi sosial yang mendukung agar dapat menjalankan keberfungsian sosialnya dengan baik.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial menyatakan bahwa Pekerja Sosial sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial. Pekerja Sosial bekerja secara profesional sesuai dengan kompetensinya dibuktikan dengan sertifikat kompetensi

yang didapatkan dari Lembaga Sertifikasi Profesi.

2. Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan Praktik Pekerjaan Sosial Fahrudin, dalam Taufiqurokhman (2020:16) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber yang memberikan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.
5. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
6. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
7. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
8. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pekerjaan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan hidup, termasuk penyelesaian masalah dan adaptasi terhadap tekanan. Selain itu, pekerjaan sosial menghubungkan individu dengan sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pekerjaan sosial juga berkontribusi dalam merumuskan kebijakan sosial yang adil, mendorong kesejahteraan manusia, dan mengurangi ketidakadilan sosial. Melalui advokasi dan aksi sosial, pekerjaan sosial berupaya menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, dengan praktik yang didasarkan pada penelitian dan keterampilan profesional, serta memperhatikan keberagaman budaya.

3. Tahapan Pekerjaan Sosial

Max Siporin dalam Khorunnisa, dkk (2023:219) menjelaskan enam tahapan dalam praktik pekerjaan sosial, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tahapan pendekatan awal, tahapan ini merupakan proses kegiatan awal meliputi penjangkauan dan penyaringan;
- 2) Menemukan dan mengerti apa yang menjadi masalah (*assessment*) adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis data ;
- 3) Perencanaan pemecahan masalah (*planning*) adalah rangkaian mekanisme yang dilakukan untuk mengetahui tujuan dan kegiatan pemecahan masalah, serta penetapan berbagai sumber daya;
- 4) Pelaksanaan pemecahan masalah (*intervention*) yaitu rangkaian mekanisme yang dilakukan dalam rangka mengimplementasikan rencana pemecahan masalah yang sudah dirumuskan;
- 5) Monitoring, memantau penyediaan layanan untuk kesesuaian, intensitas, kuantitas, kualitas, dan kemanjuran, mendokumentasikan secara sistematis kebutuhan yang belum terpenuhi dan kesenjangan dalam layanan atau sumber daya mengembangkan mekanisme untuk memantau hasil; dan
- 6) Evaluasi, terminasi serta rujukan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, Tahapan Pekerjaan Sosial dimulai dari pendekatan awal berupa penjangkauan dan penyaringan untuk mengenali klien yang membutuhkan bantuan. Dilanjutkan dengan *assessment* untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna memahami masalah yang dihadapi. Setelah itu disusun rencana pemecahan masalah melalui penetapan tujuan, strategi, dan sumber daya. Rencana tersebut kemudian diimplementasikan melalui tahap intervensi. Setelah pelaksanaan intervensi, proses dilanjutkan dengan melakukan *monitoring* untuk memastikan layanan berjalan sesuai tujuan. Terakhir, dilakukan tahap evaluasi untuk menilai hasil, dan diakhiri dengan proses terminasi dengan klien atau rujukan kepada pelayanan lain jika diperlukan.

4. Metode dan Teknik Pekerjaan Sosial

1) Metode Pekerjaan Sosial

Pekerjaan Sosial memiliki tiga metode dan teknik dalam melaksanakan intervensi. Tiga metode tersebut yakni metode Pekerjaan Sosial dengan Individu/keluarga (*Social Case Work*), metode Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Social Group Work*), dan metode Pekerjaan Sosial dengan Komunitas/Masyarakat.

Charles Zastrow dalam Hutagol & Sinaga (2024:54) mendefinisikan *Social Case Work* sebagai upaya yang dilakukan oleh Pekerja Sosial untuk membantu individu meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan mencapai kesejahteraan sosial dan emosional. Berdasarkan definisi tersebut menekankan bahwa *Social Case Work* merupakan metode intervensi berbasis individual yang bertujuan memberdayakan individu agar mampu mengatasi masalah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Pekerja Sosial tidak hanya menangani masalah, tetapi juga memanfaatkan potensi serta sumber daya internal dan eksternal dari klien. Pendekatan ini bersifat holistik, mencakup aspek sosial dan emosional, serta berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

Dwi Heru Sukoco (2021:24) menyatakan bahwa Metode *Social Case Work* digunakan dalam bekerja sama atau membantu individu dan keluarga dalam menangani permasalahan individu yang dilakukan secara tatap muka (*face to face*). Hal tersebut menekankan bahwa *Social Case Work* dilakukan melalui interaksi tatap muka. Pendekatan ini membangun hubungan yang erat antara Pekerja Sosial dan klien, sehingga pemahaman masalah dan pencarian solusi menjadi lebih efektif. Selain fokus pada penyelesaian masalah, metode ini juga

menekankan pentingnya komunikasi, empati, dan keterlibatan emosional. *Social Case Work* berperan penting dalam membantu individu atau keluarga menghadapi persoalan hidup secara manusiawi dan terarah.

2) Teknik Pekerjaan Sosial dengan Individu/Keluarga (Social Case Work)

Naomi Brill dalam Yuyun Yuliana (2013) menjelaskan bahwa terdapat beberapa teknik dalam social case work diantaranya adalah *small talk, ventilation, support, Reassurance, Confrontation, Conflict, Manipulation, Universalization, Advice Giving and Counseling, Activities and Programs, Logical Discussion, Reward and Punishment, Role Rehearsal and Demonstration, Group Dynamics Exercise, Group Games, Literary and Audiovisual Materials, Andragogy, Counciousness Raising*, Konseling, Intervensi krisis, Terapi Kelompok, penyuluhan, dan mediasi. penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut terkait teknik konseling dan support. Berikut penjelasan kedua teknik tersebut:

(1) Teknik Konseling Individu

Fairuzillah (2024) menyebutkan bahwa konseling individu merupakan suatu proses bantuan profesional yang berfokus pada interaksi langsung antara konselor dan klien secara perorangan. Proses ini bertujuan untuk membantu individu mengeksplorasi dan mengatasi permasalahan dalam suasana aman dan mendukung. Berdasarkan hal tersebut, Konseling individu merupakan intervensi profesional yang dilakukan secara personal antara konselor dan klien dengan tujuan untuk menciptakan ruang aman agar klien merasa nyaman mengungkapkan masalahnya. Proses konseling tidak hanya berfokus pada pemahaman akar masalah, tetapi juga mencari solusi dari dalam diri klien.

Nasution & Abdillah dalam Fairuzillah (2024) tujuan konseling individu adalah untuk membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya hidupnya serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri dan membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan, agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Tujuan konseling berdasarkan pernyataan tersebut adalah untuk membantu klien menyusun ulang permasalahan hidup yang dihadapinya, mengurangi pandangan negatif terhadap diri sendiri serta memperbaiki persepsi terhadap lingkungan sekitar agar klien dapat lebih terarah dalam bertingkah laku. Selain itu, konseling dapat mendukung klien dalam mengembangkan kembali minat sosial yang mungkin sempat menurun.

Menurut Zastrow dalam Fairuzillah (2024) konseling berdasarkan Perspektif Pekerja Sosial dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun Relasi (*Building a Relationship*), Pekerja Sosial harus menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Mereka harus menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman agar klien merasa nyaman untuk berbicara tentang masalahnya. Pekerja Sosial harus menunjukkan sikap penerimaan, menghormati, dan perhatian terhadap klien.
2. Menggali Masalah Secara Mendalam (*Exploring Problems in Depth*), Pekerja Sosial dan klien bekerja sama untuk memahami masalah yang dihadapi klien secara menyeluruh dengan mencari informasi tentang jenis masalah yang dialami, tingkat kesulitannya, durasi masalah, penyebab masalah, perasaan klien terhadap masalah tersebut, serta kekuatan dan kemampuan klien dalam mengatasi masalah tersebut.
3. Menggali Solusi Alternatif (*Exploring Alternatif Solution*), Setelah masalah diidentifikasi secara mendalam, Pekerja Sosial dan klien bekerja sama untuk mencari berbagai kemungkinan solusi. Pekerja Sosial bertanggung jawab untuk mengidentifikasi beberapa alternatif solusi untuk membantu klien memahami kecocokan, kelebihan, dan

keterbatasan dari setiap alternatif tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga tahapan konseling yang pertama adalah membangun hubungan antara Pekerja Sosial dan klien. Pekerja Sosial perlu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan terbuka agar klien merasa diterima dan mau berbagi permasalahannya. Setelah hubungan terbangun, tahap selanjutnya adalah menggali masalah secara mendalam. Pada tahap ini, Pekerja Sosial dan klien bekerja sama untuk memahami permasalahan secara menyeluruh, mulai dari jenis dan tingkat kesulitan masalah, lamanya masalah terjadi, penyebabnya, respons emosional klien, hingga kekuatan dan potensi klien dalam mengatasinya. Setelah pemahaman terhadap masalah diperoleh, proses dilanjutkan dengan menggali solusi alternatif. Pada tahap ini Pekerja Sosial membantu klien untuk mencari berbagai solusi dengan mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, dan kesesuaian setiap alternatif, sehingga klien dapat memilih langkah terbaik untuk menyelesaikan permasalahannya.

(2) Teknik *Support*

Naomi I. Brill & Joanne Levine dalam Yulianti (2013) mendefinisikan teknik support merupakan teknik yang memberikan semangat, menyokong dan mendorong aspek-aspek dari fungsi klien, seperti kekuatan-kekuatan internalnya, cara berperilaku dan hubungannya dengan orang lain. Support harus didasarkan pada kenyataan dan Pekerja Sosial memberikan dukungan terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan positif dari klien.

Pekerja Sosial harus membantu klien apabila klien mengalami kegagalan dan sebaliknya lebih mendorong klien apabila berhasil. Sebaiknya Pekerja Sosial

menyatakan terlebih dahulu aspek-aspek yang positif sebelum menyatakan aspek-aspek negatif dari situasi yang dialami klien.

2.1.6.2 Pekerjaan Sosial dengan Koreksional

1. Pengertian Pekerjaan Sosial Koreksional

Pekerjaan Sosial di Setting Koreksional menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan dalam Indrawati (2023:27) yaitu:

Pekerjaan Sosial Koreksional adalah sub sistem pada peradilan pidana. Pekerjaan Sosial Koreksional adalah pelayanan profesional pada setting koreksional (Lapas, Rutan, Bapas Narkoba) dan setting lain dalam sistem peradilan kriminal yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah klien agar dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya.

Pekerjaan Sosial Koreksional merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Pekerjaan Sosial Koreksional hadir sebagai suatu layanan profesional pada lembaga-lembaga yang sesuai dengan *setting* Koreksional dalam rangka membantu individu yang terlibat dalam masalah hukum untuk dapat berfungsi secara sosial dengan lebih baik.

Fokus utama pekerjaan sosial dalam sistem peradilan Menurut Zastrow (2010:319):

The primary focus of social work in the criminal justice system has been on the correctional component. Social workers have frequently been employed as probation and parole officers, as social workers in a prison, and as social workers at a correctional halfway house. There are only a few police departments that employ social workers to provide social services to individuals and families with whom police come in contact.

Pekerja Sosial melaksanakan intervensi pada *setting* Koreksional seperti Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, dan Balai Pemasyarakatan sebagai upaya memecahkan masalah klien dan meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi kembali ke masyarakat. Pekerja Sosial berfokus pada proses

pemasyarakatan, dan mempunyai peran penting meskipun keterlibatan mereka di kepolisian masih terbatas.

2. Tujuan Pekerjaan Sosial Koreksional

Tujuan Pekerjaan Sosial Koreksional yang spesifik mengarah pada tindakan menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan dalam Indrawati (2023:27) adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu Narapidana menyesuaikan diri dengan kehidupan lapas
- 2) Membantu Narapidana memahami diri mereka sendiri, relasi dengan orang lain dan apakah harapan mereka sebagai anggota Masyarakat dalam kehidupan mereka.
- 3) Membantu Narapidana melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
- 4) Membantu Narapidana memperbaiki relasi sosial dengan orang (keluarga, suami/istri, tetangga dan lingkungan sosial).

Pekerjaan Sosial Koreksional bertujuan untuk memberikan suatu perubahan-perubahan kepada individu agar mampu berfungsi kembali secara optimal di dalam lingkungan sosialnya. Perubahan tersebut dapat dicapai dengan membantu mereka memahami diri sendiri dan lingkungan, mendorong perubahan positif dalam sikap dan perilaku, memfasilitasi individu untuk beradaptasi secara sosial, serta membantu memperkuat relasi sosial.

3. Fungsi Pekerja Sosial Koreksional

Pekerja Sosial koreksional memiliki fungsi yang disebutkan oleh Dorang Luhpuri dan satriawan dalam Indrawati (2023:28) adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu klien memperkuat motivasinya;
- 2) Memberikan kesempatan pada klien menyalurkan perasaannya atau ventilasi;
- 3) Memberikan informasi kepada klien;
- 4) Membantu klien untuk membuat keputusan-keputusan;
- 5) Membantu klien merumuskan situasinya;

- 6) Membantu klien dalam mengubah lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat;
- 7) Membantu klien mengorganisasikan kembali pola perilakunya; dan
- 8) Memfasilitasi upaya rujukan.

Pekerja Sosial dalam setting Koreksional memiliki fungsi diantaranya adalah membantu WBP selama menjalani masa hukumannya dalam hal ini menjadi pendamping yang mendukung proses perubahan positif dengan cara memperkuat motivasi dalam diri WBP, menggali potensi yang ada, menetapkan tujuan yang realistis. Pekerja Sosial menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi WBP dalam memberikan informasi terkait layanan-layanan yang dapat diakses setelah bebas seperti layanan kesehatan, layanan program latihan kerja sesuai dengan kebutuhan. membantu WBP untuk membangun hubungan yang sehat dengan lingkungannya dan mencari dukungan sosial dari masyarakat

4. Peran Pekerja Sosial Koreksional

Menurut Elliot Studt dalam Rustanto (2015), Pekerja Sosial dalam bidang koreksional mempunyai peran penting diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sebagai pendidik, yaitu mendidik warga binaan pemasyarakatan untuk memperkuat konsep diri, proses belajar sosial dan sosialisasi dengan nilai yang tepat.
- 2) Sebagai konselor, yaitu memberikan kesempatan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk menyalurkan apa yang sedang dirasakan, melakukan pengorganisasian terkait pola perilaku, pengambilan Keputusan, dan pengembangan pola perilaku positif.
- 3) Sebagai penghubung, yaitu menghubungkan antara WBP dengan sistem sumber baik formal maupun informal serta kemasyarakatan seperti keluarga, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelatihan, lingkungan sosial dsb sehingga terjadi hubungan yang kondusif.
- 4) Sebagai pembela, yaitu membela kepentingan dan hak WBP dalam penyelesaian masalah yang sedang diproses secara hukum.
- 5) Sebagai mediator, yaitu menjembatani komunikasi antara WBP dengan keluarga, sekolah dan lingkungan sosial dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Seorang Pekerja Sosial Koreksional memiliki peran yang beragam diantaranya memberikan pendidikan dan konseling, menghubungkan WBP dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang dan membantu proses rehabilitasi, membela hak-hak WBP dan menjadi mediator dalam penyelesaian masalah.

2.1.7 Kajian tentang Konsep Diri

2.1.8.1 Pengertian Konsep Diri

Menurut Hurlock (Ghufron & Risnawita, dalam Sianipar 2023:22) mengatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Berdasarkan definisi tersebut, konsep diri diartikan sebagai pemahaman individu tentang dirinya sendiri yang melibatkan beberapa aspek yaitu aspek fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi. Secara keseluruhan, konsep diri adalah hasil interaksi dan dapat berubah seiring waktu serta mempengaruhi perilaku dan hubungan sosial individu.

Berzonsky (Rahmaningsih & Martani, dalam sianipar 2023:22) mendefinisikan tentang konsep diri yaitu:

Konsep diri mencakup pandangan diri terhadap empat dimensi, yaitu:

1. Diri fisik (*physical self*), meliputi seluruh kepemilikan individu yang terwujud dalam benda-benda nyata seperti tubuh, pakaian, benda material, dan sebagainya.
2. Diri sosial (*social Self*), meliputi peran-peran sosial yang dimainkan oleh individu dan penilaian individu terhadap peran tersebut.
3. Diri moral (*moral self*), meliputi semua nilai dan prinsip yang dipegang individu dalam kehidupan, dan
4. Diri psikis (*psychological self*), meliputi pemikiran, perasaan, dan sikap individu terhadap diri sendiri (proses ego).

Berdasarkan pengertian tersebut, Konsep diri terdiri dari empat dimensi yang menunjukkan bahwa pemahaman individu tentang dirinya sangat kompleks. Dimensi pertama yaitu diri fisik yang mencakup aspek yang terlihat dan dapat diukur, seperti penampilan. Dimensi kedua, diri sosial yang berfokus pada peran sosial individu dan penilaian terhadap peran tersebut. Dimensi ketiga, diri moral melibatkan nilai-nilai dan prinsip yang memandu perilaku. Dimensi terakhir, diri psikis mencakup pemikiran dan perasaan individu terhadap diri sendiri.

Konsep Diri berdasarkan kedua pengertian tersebut adalah gabungan dari aspek internal dan eksternal individu. Aspek internal mencakup pikiran, perasaan, nilai, dan sikap, sedangkan aspek eksternal mencakup penampilan fisik, peran sosial, serta interaksi dengan lingkungan. Konsep diri tidak bersifat statis, melainkan dapat berkembang seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman hidup. Pemahaman individu terhadap dirinya akan memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Oleh karena itu, konsep diri berperan penting dalam membentuk kepribadian dan relasi sosial individu.

2.1.8.2 Fungsi Konsep Diri

Menurut Clara R. Pudjijogyanti dalam Brilliant (2021:16) terdapat tiga alasan yang menjelaskan peranan penting konsep diri dalam menentukan perilaku, yaitu:

1. Konsep diri mempunyai peran dalam mempertahankan keselarasan batin (*inner consistency*). Alasan ini karena sebenarnya manusia berusaha mempertahankan keselarasan batinnya. Apabila muncul perasaan, pikiran, atau persepsi yang tidak seimbang, maka akan terjadi situasi psikologis yang tidak menyenangkan.
2. Seluruh sikap dan pandangan individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi individu tersebut dalam menafsirkan pengalamannya.

Setiap kejadian akan ditafsirkan berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya karena masing-masing individu mempunyai sikap dan pandangan yang berbeda terhadap diri mereka.

3. Konsep diri menentukan pengharapan individu. Beberapa ahli mengatakan bahwa pengharapan ini merupakan inti dari konsep diri.

Konsep diri memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan batin seseorang. konsep diri tidak hanya berperan dalam pembentukan persepsi terhadap pengalaman, tetapi juga menentukan harapan-harapan individu terhadap dirinya di masa depan. Bahkan, beberapa ahli berpendapat bahwa harapan tersebut merupakan inti dari konsep diri itu sendiri.

2.1.8 Kajian tentang Motivasi

2.1.9.1 Pengertian Motivasi

Motivasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Mc. Donald (Sadirma, dalam Annisa 2023:24) motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang dapat ditandai dengan munculnya “*feeling*” dan dapat didahului dengan adanya tanggapan terhadap suatu tujuan sedangkan menurut Munandar (Mulyadi, dalam Aldis 2023:16) mendefinisikan motivasi sebagai suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut, motivasi merupakan proses psikologis yang dimulai dari adanya kebutuhan dalam diri seseorang yang mendorong individu untuk melakukan berbagai aktivitas tertentu. Aktivitas tersebut dapat dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau

target yang diinginkan. Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai kekuatan internal yang mengarahkan perilaku individu agar fokus pada pencapaian tujuan tertentu. Oleh karena itu, pemahaman tentang motivasi sangat penting, terutama dalam konteks pembinaan, pendidikan, atau pengembangan diri, karena motivasi memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah, intensitas, dan ketekunan seseorang dalam bertindak.

2.1.9.2 Jenis-jenis motivasi

Gerungan dalam Aldis (2023:18) membagi motivasi menjadi tiga motif sebagai berikut:

1. Motif Biogenetis, yaitu motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan individu demi kelanjutan kehidupannya secara biologis. Motif ini asli di dalam diri seseorang dan berkembang dengan sendirinya, seperti lapar, haus, kebutuhan akan kegiatan dan beristirahat, mengambil nafas, mandi, buang air dan sebagainya.
2. Motif Sosiogenetis, yaitu motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Motif ini didasari oleh interaksi sosial individu atau hasil kebudayaan orang, seperti keinginan untuk mendengarkan musik tertentu, keinginan untuk membaca buku tertentu maupun keinginan untuk bermain permainan tertentu.
3. Motif Teogenetis, yaitu motif yang berasal dari interaksi manusia dengan Tuhan seperti yang terwujud dalam ibadahnya dan norma-norma agama yang direalisasikan dalam kehidupan sehari-harinya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa motif dalam diri manusia dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu biogenetis, sosiogenetis, dan teogenetis. Motif biogenetis adalah dorongan yang berasal dari kebutuhan dasar biologis individu untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Motif ini bersifat alami dan muncul secara otomatis, seperti rasa lapar, haus, kebutuhan untuk beristirahat, bergerak, bernapas, mandi, dan buang air. Sedangkan motif sosiogenetis, yaitu

dorongan yang diperoleh melalui proses pembelajaran dalam lingkungan sosial dan budaya tempat individu berada. Motif ini berkembang dari interaksi sosial atau pengaruh kebudayaan, contohnya keinginan untuk menikmati musik tertentu, membaca buku, atau bermain permainan yang disukai. Sementara itu, motif teogenetis adalah dorongan yang bersumber dari hubungan manusia dengan Tuhan, yang tercermin dalam praktik ibadah serta penerapan nilai-nilai dan norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga jenis motif ini menunjukkan bahwa dorongan manusia untuk bertindak dapat muncul dari kebutuhan biologis, sosial, maupun spiritual.

2.1.9.3 Faktor yang mempengaruhi motivasi

Motivasi dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam diri individu (intrinsik) dan faktor dari luar diri individu (ekstrinsik). Menurut Thahir dalam Aldis (2023:19) Faktor internal yang memengaruhi motivasi berasal dari dalam diri individu dan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, persepsi individu tentang dirinya sendiri sangat berpengaruh dalam menentukan arah dan dorongan perilaku, karena pandangan ini akan memengaruhi tindakan yang diambil. Kedua, harga diri dan keinginan untuk berprestasi menjadi pendorong utama bagi individu untuk mencapai kemandirian, ketahanan, serta mendapatkan pengakuan dan posisi tertentu dalam masyarakat. Ketiga, harapan memainkan peran penting dalam membentuk tujuan perilaku; harapan ini dipengaruhi oleh pengalaman dan informasi dari lingkungan, yang selanjutnya memengaruhi sikap dan perasaan individu. Keempat, kebutuhan individu berfungsi sebagai pemicu utama untuk bertindak, baik dalam mencari maupun menghindari sesuatu, serta

merespons tekanan yang ada. Terakhir, kepuasan kerja muncul sebagai dorongan emosional dari dalam diri individu untuk mencapai tujuan yang pada akhirnya dapat memperkuat keterlibatan mereka dalam aktivitas yang dilakukan.

Faktor eksternal Faktor eksternal yang memengaruhi motivasi berkaitan dengan kondisi di luar diri individu yang dapat membentuk sikap dan perilaku dalam bekerja. Jenis dan karakteristik pekerjaan yang sesuai dengan objek atau bidang kerja yang tersedia akan memengaruhi pilihan profesi yang ingin dijalani seseorang. Selain itu, keberadaan dalam kelompok kerja atau organisasi juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu. Melalui interaksi sosial dalam kelompok tersebut, individu dapat termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu serta memperoleh nilai-nilai seperti kebenaran, kejujuran, dan makna dalam kehidupan sosialnya. Faktor lingkungan sekitar juga berkontribusi dalam mendorong individu untuk menyesuaikan diri dan berinteraksi secara efektif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, sistem imbalan yang diterapkan menjadi pendorong motivasi; ketika perilaku tertentu dihargai atau diberikan imbalan, individu akan semakin termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut, karena perilaku tersebut dianggap bernilai dan layak untuk diperjuangkan.

Motivasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Faktor internal meliputi persepsi diri, harga diri, harapan, kebutuhan, dan kepuasan kerja. Kelima aspek ini membentuk dorongan dari dalam yang memengaruhi arah perilaku individu. Sementara itu, faktor eksternal mencakup jenis pekerjaan, kelompok kerja, lingkungan, dan sistem imbalan. Faktor-faktor eksternal ini membentuk

motivasi melalui pengaruh sosial, budaya, dan penghargaan. Keduanya saling berinteraksi dalam membentuk motivasi dan keterlibatan individu dalam suatu aktivitas.